

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi gig sangat pesat. Contoh dari ekonomi gig yang terkenal di Indonesia adalah jenis *on-demand platform* atau aplikasi berbasis permintaan konsumen pada industri *ride-hailing* atau transportasi seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. Pesatnya pertumbuhan ekonomi gig di Indonesia tentunya menghadirkan potensi pajak yang cukup besar. Akan tetapi, secara normatif, belum terdapat peraturan perpajakan yang secara khusus mengatur mengenai ekonomi gig. Terlebih, peraturan perpajakan yang ada belum cukup memadai untuk dijadikan landasan pengenaan pajak bagi pekerja gig. Hal ini disebabkan oleh peraturan perpajakan yang ada lebih menitikberatkan pada pengenaan pajak bagi pekerja formal seperti karyawan. Selain itu, berdasarkan hasil identifikasi peraturan perpajakan yang relevan, belum terdapat peraturan yang secara tepat mengatur pajak penghasilan bagi pekerja gig atas penghasilan yang mereka terima. Lebih lanjut, mengingat bahwa hubungan antara pekerja gig dan perusahaan platform digital adalah hubungan kemitraan yang mengacu pada UU UMKM, pekerja gig dapat dikenakan PPh UMKM jika mereka memenuhi kriteria UMKM. Namun demikian, evaluasi spesifik terhadap masing-masing kasus perlu dilakukan untuk memastikan klasifikasi yang tepat dan penerapan PPh yang sesuai.

Tantangan perpajakan dalam ekonomi gig tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di banyak negara, hal ini juga menjadi masalah hukum yang kompleks, mengingat status kepegawaian mereka bukan karyawan. Akan tetapi, terdapat beberapa negara seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda yang telah menerapkan peraturan perpajakan bagi pekerja gig untuk mengatasi tantangan tersebut. Dari pengalaman negara-negara ini, Indonesia dapat mempertimbangkan pendekatan yang serupa dari Spanyol, Inggris, dan Belanda dalam mengatur pengenaan pajak bagi pekerja gig.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. **Mendorong pembentukan regulasi yang khusus untuk ekonomi gig:** Pemerintah Indonesia perlu segera mengembangkan peraturan perpajakan yang khusus mengatur pengenaan pajak bagi pekerja gig. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat, termasuk pekerja gig dan perusahaan platform digital, memahami kewajiban pajak mereka dan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan.
2. **Studi komparatif terhadap pengalaman negara-negara lain:** Indonesia dapat melakukan studi komparatif terhadap pengalaman Spanyol, Inggris, Belanda, maupun negara lainnya dalam mengatur pajak bagi pekerja gig. Dengan mempelajari pendekatan dan solusi yang telah diterapkan oleh negara-negara tersebut, Indonesia dapat mengeksplorasi opsi terbaik yang sesuai dengan kondisi ekonomi gig di Indonesia.
3. **Kolaborasi dengan pihak terkait:** Pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti perusahaan platform digital, asosiasi pekerja gig, dan ahli pajak, untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan perpajakan dalam ekonomi gig dan menciptakan kerangka hukum yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
- Bohari, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Edwards, Jeremy., et.al., *The Taxation of Workers in the Gig Economy - a European Perspective*, London: Baker Mckenzie, 2019.
- Kacher, Nicholas, dan Stephan Weiler, *Inside the Rise of the Gig Economy*, Colorado: Regional Economic Development Institute, 2019.
- Khalimi, dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*, Bandar Lampung: Aura Publisher, 2020.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.
- Milanez, Anna, dan Barbara Bratta, *Taxation and The Future of Work*, Paris: OECD Publishing, 2019.
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera, 2014.
- OECD, *The Sharing and Gig Economy: Effective Taxation of Platform Sellers: Forum on Tax Administration*, Paris: OECD Publishing, 2019.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Putri, Treviliana Eka., et.al., *Fairwork Ratings Indonesia 2021: Standar Kerja Layak pada Gig Economy*, Yogyakarta: Fairwork, 2021.
- Rahardja, Pratama, dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi 4*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019.
- Sihombing, Sotarduga, dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Bandung: CV Widina Media Utama, 2020.
- Soemitro, Rachmat, dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Taufik, Mohammad, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2019.
- TMBooks, *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Waeyaert, Williem., et.al., *Spain: The 'Riders' Law', New Regulation on Digital Platform Work*, Spain: European Agency for Safety and Health at Work, 2022.
- Waluyo, *Buku I Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.

### JURNAL

- Muhammad Yorga Permana, et.al., *Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution*, 21 Jurnal Manajemen Teknologi. (2022).

- Nabiyla Risfa Izzati, *Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 3 Masalah-Masalah Hukum. (2021).
- Nabiyla Risfa Izzati dan Mas Muhammad Gibran Sesunan, *'Misclassified Partnership' and the Impact of Legal Loophole on Workers*, 10 Bestuur. (2022).
- Victory Haris Kusuma Wardhana, et.al., *Regulatory Developments in the Gig Economy: A Literature Review*, 21 Jurnal The Winners. (2020).

## **HUKUM INTERNASIONAL**

- Dutch Civil Code, 1992.
- Law 35/2006 Of 28 November, Personal Income Tax And Partial Modification Of The Tax Laws Tax, Non-Resident Income And On Capital, 2006.
- Supreme Court of the United Kingdom, *Uber BV and others v Aslam and others*, 2021.
- The Platform Operators (Due Diligence and Reporting Requirements) Regulations 2023, 2023.
- United Kingdom Employment Rights Act of 1996, 1996.

## **HUKUM NASIONAL**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, L.N.R.I. Tahun 2007 No. 85.
- Undang-Undang R.I., No. 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 39.
- Undang-Undang R.I., No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, L.N.R.I. Tahun 2008 No. 93.
- Undang-Undang R.I., No. 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, L.N.R.I. Tahun 2008 No. 133.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu, 2017.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, 2019.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, 2016.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/PDT.SUS/2009.

## SITUS INTERNET

- Adeline Hilary Tambunan, Mengenal Subjek Pajak PPh  
<https://www.pajakku.com/read/63649959b577d80e80788534/Mengenal-Subjek-Pajak-PPh-> (diakses 12 April, 2024).
- Ageng Prabandaru, Pahami Lebih Jauh Terkait Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak,  
<https://klikpajak.id/blog/pahami-lebih-jauh-terkait-subjek-pajak-dan-bukan-subjek-pajak/#:~:text=Artinya%20badan%20ini%20tidak%20melakukan,didefinisikan%20dalam%20undang%20Dundang%20terkait> (diakses 14 April, 2024).
- Bill Wilson, What is the 'gig' economy?,  
<https://www.bbc.com/news/business-38930048> (diakses 5 Maret 2024).
- Career Bridge Limited, The Rise of the Gig Economy: An In-Depth Overview,  
<https://www.linkedin.com/pulse/rise-gig-economy-in-depth-overview-career-bridge-limited-xn0pf/> (diakses 5 Maret 2024).
- Cunningstons LLP, Employment Law & The Gig Economy,  
<https://cunningstons.co.uk/gig-economy-employment-law/> (diakses 19 Mei 2024).
- Daniel Woodman & Co, The Gig Economy and Employment Rights: A Legal Perspective in England and Wales,  
<https://danielwoodman.co.uk/2024/02/22/the-gig-economy-and-employment-rights> (diakses 19 Mei 2024).
- Eerste Kamer der Staten-Generaal, Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie,  
[https://www.eerstekamer.nl/nonav/wetsvoorstel/36063\\_wet\\_implementatie\\_eu](https://www.eerstekamer.nl/nonav/wetsvoorstel/36063_wet_implementatie_eu) (diakses 25 Mei 2024).
- Gojek, Ketentuan Penggunaan Aplikasi Go Partner Untuk Mitra,  
<https://www.gojek.com/id-id/app/ketentuan-penggunaan-aplikasi-gopartner-untuk-mitra-2w> (diakses 7 Mei 2024).
- Government UK, HM Revenue & Customs: What We Do,  
<https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs> (diakses 20 Mei 2024).
- Grab, Ketentuan Layanan dan Kebijakan  
<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> (diakses 7 Mei 2024).
- Heru Tjaraka, Modul 1 Pengantar Perpajakan,  
<https://repository.ut.ac.id/3845/1/EKSI4202-M1.pdf> (diakses 8 April, 2024).
- Houthoff, Dutch DAC7 Law Adopted: New Reporting Obligations for Online Platforms,

- <https://www.houthoff.com/insights/news-update/dutch-dac7-law-adopted-new-reporting-obligations-for-online-platforms> (diakses 25 Mei 2024).
- ICAEW Insights, Uber drivers are workers. What does that mean for tax and employment?,  
<https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2021/april-2021/uber-drivers-are-workers> (diakses 20 Mei 2024).
- International Labour Organization, Non-Standard Forms of Employment,  
<https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang-en/index.htm> (diakses 8 Maret 2024)
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Peran Ekosistem Gojek di Ekonomi Indonesia Saat dan Sebelum Pandemi Covid-19,  
[https://drive.google.com/file/d/1RgVRNJasz36-3z\\_smhsqBegrufhNWw/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1RgVRNJasz36-3z_smhsqBegrufhNWw/view?usp=sharing) (diakses 23 Desember 2023)
- Nabiyla Risfa Izzati, Sisi Gelap Pekerja Gig Economy Indonesia: Disebut ‘Mitra’ Tapi Tak Ada Payung Hukumnya,  
<https://www.vice.com/id/article/y3pnmk/mitra-ojol-dan-kurir-tak-punya-payung-hukum-tak-terlindungi-hak-bpjs-upah-minimum-imbis-gig-economy> (diakses 4 Januari 2024)
- PWC Legal, *Gig Economy 2021*,  
<https://www.pwclegal.be/en/FY21/gig-economy-report-v3-2021.pdf> (diakses 16 Mei 2024).
- Rani Maulida, Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia,  
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak> (terakhir diakses 26 Desember 2023).
- Ruruh Handayani, PPh 21 yang dipungut Aplikator Ojol Dipertanyakan,  
<https://www.pajak.com/pajak/pph-21-yang-dipungut-aplikator-ojol-dipertanyakan/> (diakses 24 Januari 2024)
- Saufa Ata Taqiyya, Perbedaan Hubungan Kemitraan dengan Hubungan Kerja,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hubungan-kemitraan-dengan-hubungan-kerja-lt617136e8e2fce/> (diakses 5 Maret 2024).
- The Law Dictionary, Tax Definition & Legal Meaning,  
<https://thelawdictionary.org/tax/#:~:text=Definition%20%26%20Citations%3A,%20supply%2C%20or%20other%20name.> (diakses 26 Desember 2023)
- Vallencia, Mencermati Tantangan Mekanisme Withholding Tax PPh Pasal 21,  
<https://news.ddtc.co.id/mencermati-tantangan-mekanisme-withholding-tax-pph-pasal-21-39072> (diakses 24 April 2024).